

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan disertai kesenjangan ekonomi selalu menjadi situasi global dan bukan fenomena baru lagi untuk dikaji pada berbagai penelitian ilmiah. Faktanya dalam pembangunan ekonomi di setiap negara dunia, kemiskinan merupakan permasalahan fundamental dan krusial terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia (Mustika, 2011). Persoalan kemiskinan telah menjadi prioritas yang utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dunia. Pengentasan kemiskinan (*no poverty*) ditargetkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tahun 2030. Suatu negara merencanakan pembangunan perekonomian diproyeksikan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Masyarakat tradisional dengan kondisi tertinggal, memerlukan pengembangan diri menuju ke arah lebih baik dan maju untuk memperoleh tingkat kesejahteraan ekonomi yang semakin layak.

Masalah kemiskinan yang membutuhkan penanganan serius dan sesegera mungkin dari pemerintah ini, juga menjadi fenomena sosial kemasyarakatan di berbagai daerah kabupaten/ kota. Melalui pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah bersinergi untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin. Walaupun demikian, upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka mengentaskan kemiskinan tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah namun dibutuhkan kerja sama, komitmen dan kontribusi seluruh pihak untuk mencapai tujuan mulia tersebut.

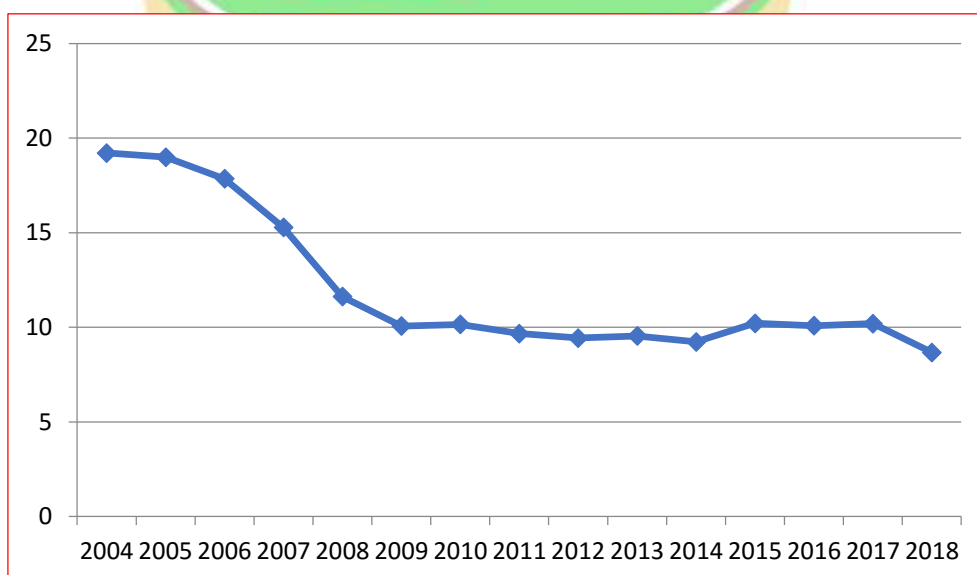
Program-program kebijakan pembangunan yang dilaksanakan memang belum sepenuhnya berhasil menghapuskan permasalahan kemiskinan hingga benar-benar tuntas. Meskipun demikian, pemerintah terus-menerus berupaya melalui berbagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam proses mengurangi angka kemiskinan ini.

**Tabel 1.1. Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Toba Samosir, tahun 2004-2018**

| Tahun | Jumlah (000) | Persentase (%) |
|-------|--------------|----------------|
| 2004  | 58,40        | 19,21          |
| 2005  | 30,80        | 18,99          |
| 2006  | 30,18        | 17,85          |
| 2007  | 25,60        | 15,28          |
| 2008  | 19,78        | 11,62          |
| 2009  | 17,34        | 10,07          |
| 2010  | 17,60        | 10,15          |
| 2011  | 16,93        | 9,67           |
| 2012  | 16,64        | 9,43           |
| 2013  | 16,96        | 9,54           |
| 2014  | 16,51        | 9,23           |
| 2015  | 18,31        | 10,21          |
| 2016  | 18,20        | 10,08          |
| 2017  | 18,49        | 10,19          |
| 2018  | 15,82        | 8,67           |

Sumber: BPS Susenas, Toba Samosir dalam Angka 2019 (Diolah)

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Toba Samosir dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Sumber: BPS Susenas, Toba Samosir dalam Angka 2019 (Diolah)

**Gambar 1.1. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Toba Samosir, tahun 2004-2018 (dalam %)**

Data pada tabel 1.1 dan gambar 1.1 memperlihatkan, dimana perkembangan penduduk miskin Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2004 hingga tahun 2013 cenderung mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2014 hingga 2017 kembali ditemukan kenaikan angka kemiskinan walaupun dengan persentase yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2018 kemiskinan menurun 1,52%. Sementara itu, data jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I pada tahun 2017 dan 2018 yang diperoleh dari BPS Kabupaten Toba Samosir dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

**Tabel 1.2. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS I  
Dirinci dari Penyerapan Dana Takesra  
Menurut Kecamatan, tahun 2017-2018**

| No.    | Kecamatan           | 2017          | 2018          |
|--------|---------------------|---------------|---------------|
| 1.     | Balige              | 2.409         | 2.393         |
| 2.     | Tampahan            | 332           | 278           |
| 3.     | Laguboti            | 1.749         | -             |
| 4.     | Habinsaran          | 2.190         | 864           |
| 5.     | Borbor              | 965           | -             |
| 6.     | Nassau              | 763           | 941           |
| 7.     | Silaen              | 1.799         | 1.666         |
| 8.     | Sigumpar            | 1.086         | 599           |
| 9.     | Porsea              | 784           | 247           |
| 10.    | Pintu Pohan Meranti | 812           | 812           |
| 11.    | Siantar Narumonda   | 490           | 510           |
| 12.    | Parmaksian          | 1.136         | 897           |
| 13.    | Lumban Julu         | 988           | 988           |
| 14.    | Uluan               | 526           | 295           |
| 15.    | Ajibata             | 1.055         | 1.108         |
| 16.    | Bonatua Lunasi      | 391           | 523           |
| Jumlah |                     | <b>17.475</b> | <b>12.121</b> |
|        |                     | <b>2016</b>   | <b>16.405</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Toba Samosir dalam angka 2018 & 2019 (Diolah)

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengentaskan kemiskinan penduduk tidak hanya melalui pelaksanaan program pemberdayaan keluarga, akan tetapi program ini memiliki peranan cukup penting dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial dan aspek kehidupan lainnya. Program pemberdayaan keluarga memerlukan kebijakan yang komprehensif, sinergis, efektif dan efisien antara pemerintah, pihak swasta serta masyarakat umum dalam memberdayakan warga miskin tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Agenda prioritas ketiga Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, telah membuka kesempatan cukup luas bagi daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya khususnya di perdesaan. Disamping pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan rumah tidak layak huni, jembatan, irigasi, drainase dan fasilitas lainnya, dilaksanakan juga pembangunan non fisik berupa pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, terutama di daerah perdesaan.

Melalui program pemberian pelatihan keterampilan bagi warga masyarakat terutama kepada ibu-ibu rumah tangga, agar dapat membantu meningkatkan penghasilan keluarganya. Pelatihan dimaksud antara lain keterampilan bertenun, produksi makanan khas lokal, pembuatan kerajinan serta pelatihan kewirausahaan lainnya yang dapat dipergunakan sebagai bekal dalam mengelola suatu kelompok usaha.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pembangunan berkelanjutan mengedepankan penduduk sebagai titik sentral dalam pelaksanaannya di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan dimaksud adalah pembangunan terencana dalam segala bidang, untuk mewujudkan keseimbangan yang ideal antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas lingkungan serta pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kebutuhan dan kemampuan generasi selanjutnya, sehingga dapat menunjang kehidupan bangsa pada masa mendatang.

Melalui kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang berkelanjutan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya berkomitmen untuk menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan jumlah penduduk, tetapi juga bertanggungjawab pada pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I melalui upaya kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan ekonomi keluarga dimaksud adalah melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan program Keluarga Berencana (KB) dan bertujuan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini dikarenakan tanpa kondisi ekonomi yang baik, mustahil keluarga akan dapat meningkatkan kualitas kehidupannya. Kegiatan usaha ini dirintis oleh BKKBN dengan model usaha mikro keluarga, yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga miskin dengan menggugah minat dan semangat keluarga tersebut untuk berwirausaha secara mandiri.

UPPKS merupakan wadah pembinaan dan pembangunan keluarga, khususnya dalam pengembangan fungsi ekonomi keluarga. Melalui kegiatan UPPKS difasilitasi minat kewirausahaan dan pengkoordinasian usaha ekonomi produktif. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan dimotori oleh BKKBN untuk mengembangkan kelompok UPPKS ini (BKKBN, 2007), antara lain:

- 1) Memberikan bantuan fasilitas permodalan kepada kelompok yang meliputi dana bergulir;
- 2) Pembinaan dan pengembangan usaha kelompok UPPKS melalui kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, pembinaan kemitraan baik dalam hal permodalan, produksi, manajemen usaha, penerapan teknologi tepat guna dan pemasaran;
- 3) Pembinaan jaringan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan akses anggota kelompok dengan berbagai pihak;
- 4) Pembinaan produksi agar kelompok UPPKS menghasilkan produk, baik kuantitas maupun kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar.

Dalam upaya mencapai sasaran pengembangan kelompok UPPKS pada setiap lini lapangan, BKKBN membuat suatu pedoman yang dimulai dari bagaimana pembentukan kelompok, pengelolaan serta pembinaannya sehingga kegiatan UPPKS ini dapat berkembang sesuai dengan harapan. Adapun ukuran keberhasilan program UPPKS sesuai buku pedoman pengelolaan dan pengembangan kelompok UPPKS oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2010, hal. 98) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesertaan dan kemandirian ber-KB pada anggota kelompok UPPKS terutama pada keluarga yang tergolong kurang mampu, yaitu keluarga pra sejahtera dan sejahtera I;
- 2) Meningkatnya jumlah anggota keluarga pra sejahtera dan sejahtera I untuk tergabung dalam kegiatan kelompok UPPKS;
- 3) Meningkatnya jumlah kegiatan dan beragamnya jenis usaha yang dapat dikelola oleh kelompok UPPKS;
- 4) Meningkatnya kualitas produksi usaha kelompok UPPKS;
- 5) Meningkatnya tahapan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS melalui peningkatan pendapatan keluarga; dan
- 6) Meningkatnya dinamika anggota kelompok UPPKS.

Keanggotaan kelompok UPPKS terdiri atas masyarakat pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III<sup>+</sup> baik yang belum, sedang maupun purna peserta KB, guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (BKKBN, 1995). Pemerintah berperan penting mendorong kedinamikaan dan kesejahteraan kelompok UPPKS. Peranan dimaksud adalah dengan melakukan berbagai kegiatan pembinaan dan memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan program UPPKS. Di dalam pedoman pelaksanaan kelompok UPPKS, terdapat 6 (enam) agenda pembinaan yang dapat dilakukan oleh fasilitator (BKKBN, 2010, hal. 95), yakni sebagai berikut:

- 1) Pembinaan organisasi;
- 2) Pembinaan permodalan;
- 3) Pembinaan usaha ekonomi produktif;
- 4) Pembinaan administrasi dan pembukuan;
- 5) Pembinaan pemasaran; dan
- 6) Pembinaan kesertaan ber-KB.

Pada tahun 2018, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaksanaan UPPKS di Kabupaten Toba Samosir, sasaran program tersebut pada umumnya ditujukan bagi keluarga miskin dan kurang berkemahiran dalam bidang kewirausahaan. Sehingga, anggota kelompok UPPKS tersebut diupayakan memperoleh pembinaan dari BKKBN melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Toba Samosir yang dalam hal ini berupaya mendukung kegiatan UPPKS dari perspektif peningkatan keterampilan, bantuan permodalan dan alat-alat teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh kelompok.

Walaupun berbagai kegiatan dan upaya tersebut telah dilaksanakan oleh DPPKB dengan dibantu sejumlah dinas lintas sektoral yang terkait, pada kenyataannya di lapangan masih terdapat permasalahan dalam implementasinya dimana sebagian besar kelompok UPPKS mengalami kemunduran yang dibuktikan dengan menurunnya aktivitas dan kualitas kegiatan kelompok tersebut.

Sekaitan dengan itu, peneliti sependapat dengan studi terdahulu. Dalam kajiannya, Putri (2017) mengidentifikasi belum meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan kelompok UPPKS di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Masih terdapatnya kelemahan pengurus UPPKS dalam kewirausahaan, manajemen usaha dan pengelolaan keuangan;
- 2) Pembinaan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dinilai belum optimal dan berkelanjutan secara terus-menerus, kemudian substansi materi semata-mata berkutat pada pelaporan dan pembukuan keuangan yang bersifat administratif;
- 3) Kelompok UPPKS masih kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal yang lebih layak, murah dan mudah di dalam proses pengurusannya;
- 4) Kelompok UPPKS belum terampil dalam menyesuaikan bidang usahanya dengan potensi daerah dan ketersediaan bahan baku;
- 5) Jangkauan pemasaran hasil produksi usaha yang terbatas; dan
- 6) Belum terdapat peningkatan tahapan keluarga sejahtera.

**Tabel 1.3. Data UPPKS Kabupaten Toba Samosir, tahun 2015 & 2018**

| Kecamatan               | Jumlah<br>Desa/<br>Kelurahan | Jumlah<br>kelompok<br>UPPKS |           | Jumlah<br>anggota<br>UPPKS |            | Jumlah keluarga<br>pra sejahtera |            |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|                         |                              | 2015                        | 2018      | 2015                       | 2018       | 2015                             | 2018       |
| 1. Tampahan             | 6                            | 1                           | 4         | 10                         | 40         | 9                                | 35         |
| 2. Balige               | 35                           | 3                           | 5         | 30                         | 111        | 30                               | 111        |
| 3. Laguboti             | 23                           | 1                           | 3         | 10                         | 50         | 10                               | 40         |
| 4. Sigumpar             | 10                           | 2                           | 1         | 21                         | 10         | 21                               | 5          |
| 5. Silaen               | 23                           | 4                           | 14        | 42                         | 162        | 42                               | 162        |
| 6. Habinsaran           | 22                           | 1                           | 1         | 10                         | 10         | 10                               | 10         |
| 7. Borbor               | 15                           | 1                           | 4         | 10                         | 96         | 10                               | 80         |
| 8. Nassau               | 10                           | 0                           | 1         | 0                          | 10         | 0                                | 10         |
| 9. Siantar Narumonda    | 14                           | 1                           | 7         | 10                         | 70         | 10                               | 60         |
| 10. Uluan               | 17                           | 3                           | 1         | 30                         | 15         | 27                               | 15         |
| 11. Porsea              | 17                           | 7                           | 7         | 84                         | 72         | 84                               | 72         |
| 12. Pintu Pohan Meranti | 7                            | 1                           | 5         | 10                         | 36         | 10                               | 36         |
| 13. Parmaksian          | 11                           | 3                           | 2         | 34                         | 52         | 32                               | 20         |
| 14. Bonatua Lunasi      | 12                           | 1                           | 2         | 10                         | 20         | 9                                | 18         |
| 15. Lumban Julu         | 12                           | 4                           | 7         | 42                         | 74         | 32                               | 50         |
| 16. Ajibata             | 10                           | 1                           | 1         | 10                         | 12         | 10                               | 12         |
| <b>Jumlah</b>           | <b>244</b>                   | <b>34</b>                   | <b>65</b> | <b>363</b>                 | <b>840</b> | <b>336</b>                       | <b>736</b> |

Sumber: Dinas PPKB Kabupaten Toba Samosir, tahun 2015 & 2018 (Data diolah)

Data kelompok UPPKS di Kabupaten Toba Samosir sebagaimana diperlihatkan pada tabel 1.3 bahwa dari sebanyak 244 desa dan kelurahan, pada tahun 2015 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membina sebanyak 34 kelompok UPPKS dengan jumlah anggota sebanyak 363 orang dimana 336 diantaranya berasal dari keluarga pra sejahtera. Kemudian sampai pada tahun 2018 telah berkembang pembentukan kelompok baru sehingga jumlah kelompok dibina menjadi 65 kelompok dengan jumlah anggota UPPKS sebanyak 840 orang dengan jumlah keluarga pra sejahtera adalah 736 keluarga.

Perkembangan UPPKS di Kabupaten Toba Samosir pada saat ini memang memenuhi ukuran keberhasilan program ini, jika berpedoman pada ketentuan pengelolaan dan pengembangan kelompok UPPKS yang dikeluarkan oleh BKKBN. Anggota keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I mengalami peningkatan kuantitas untuk tergabung dalam kegiatan kelompok UPPKS dan memperoleh berbagai bantuan dari program di daerah pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara tersebut.

Ditemukan fakta berdasarkan data pada tabel 1.3 dan hasil pengamatan peneliti di lapangan, masih terdapat sebagian besar kelompok UPPKS yang belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Data tersebut menunjukkan jumlah anggota kelompok tahapan keluarga pra sejahtera mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir ini. Perubahan kuantitas kelompok pada data keadaan 2018 disebabkan adanya pembentukan kelompok-kelompok baru, namun terdapat juga kelompok yang belum berhasil menjalankan kegiatan usahanya dan mengakibatkan pembubaran kelompok tersebut. Alhasil, masyarakat miskin kembali bergantung pada bantuan-bantuan dan kompensasi dari pemerintah.

Melihat kondisi seperti ini, diharapkan DPPKB Kabupaten Toba Samosir dapat segera tanggap terhadap kelemahan-kelemahan pada kegiatan kelompok UPPKS dan berusaha untuk memperbaikinya. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir seyogianya dapat lebih memberikan perhatian khusus dan melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi berbagai kekurangan dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan ini.

Hal ini dikarenakan apabila permasalahan tersebut dibiarkan begitu saja, maka tujuan program UPPKS untuk menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga akan sulit dicapai sesuai harapan dan perencanaan. Dengan demikian program kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan tidak akan mencapai kesuksesan di daerah Kabupaten Toba Samosir.

## B. Perumusan Masalah

Bantuan permodalan berupa dana bergulir yang telah dikucurkan, kegiatan pelatihan keterampilan, pendampingan pemasaran dan pembinaan pengelolaan kelompok usaha yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program UPPKS seharusnya dapat meningkatkan pendapatan anggotanya sebagai langkah peningkatan kesejahteraan. Namun, pada kenyataannya sebagian besar anggota kelompok ini masih belum dapat menambah pendapatan keluarganya.

Keluarga pra sejahtera belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya dan keluar dari kemiskinan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai performa dan peran serta keluarga pra sejahtera guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonominya melalui pelaksanaan program UPPKS, dimana telah dilaksanakannya pembinaan terhadap anggota kelompok oleh pemerintah daerah melalui berbagai program kegiatan, sementara peran keluarga miskin/ pra sejahtera belum terlaksana secara optimal, efektif dan efisien.

Sesuai dengan pemaparan masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan permasalahan di dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kesejahteraan keluarga pra sejahtera sebelum menjadi peserta UPPKS dibandingkan dengan setelah menjadi peserta UPPKS di Kabupaten Toba Samosir?
2. Bagaimanakah pengaruh keikutsertaan keluarga pra sejahtera menjadi anggota UPPKS terhadap pendapatan dibandingkan dengan keluarga pra sejahtera bukan anggota UPPKS di Kabupaten Toba Samosir?
3. Masalah apakah yang menyebabkan belum tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program UPPKS di Kabupaten Toba Samosir?
4. Bagaimanakah langkah-langkah kebijakan yang diperlukan oleh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan program UPPKS, dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Toba Samosir?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk perumusan masalah di atas dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan:

1. Mendeskripsikan tingkat kesejahteraan keluarga pra sejahtera sebelum menjadi peserta UPPKS dibandingkan dengan setelah menjadi peserta UPPKS di Kabupaten Toba Samosir.
2. Menganalisis pengaruh keikutsertaan keluarga pra sejahtera menjadi anggota UPPKS terhadap pendapatan dibandingkan dengan keluarga pra sejahtera bukan anggota UPPKS di Kabupaten Toba Samosir.
3. Menemukan permasalahan apa saja yang menyebabkan belum tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program kegiatan UPPKS di Kabupaten Toba Samosir.
4. Merumuskan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan oleh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan program UPPKS, dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Toba Samosir.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Untuk dapat mengembangkan metode bagi riset-riset yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, juga sebagai bahan pustaka dan referensi bagi pihak membutuhkan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan keilmuan terkait pembinaan ketahanan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang faktual bagi pemerintah daerah, khususnya instansi terkait yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk pengambilan kebijakan peningkatan ekonomi keluarga melalui pelaksanaan program UPPKS.

### E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah mencakup permasalahan yang melekat pada pelaksanaan program UPPKS sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Toba Samosir. Penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa batasan. Adapun batasan-batasan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera-I yang menjadi peserta UPPKS dan bukan peserta UPPKS di Kabupaten Toba Samosir. Peserta UPPKS dimaksud menerima bantuan program UPPKS dan mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Studi ini untuk mengestimasi pengaruh pendidikan formal, pengalaman, jenis kelamin dan keikutsertaan anggota UPPKS terhadap pendapatan dibandingkan dengan yang bukan anggota UPPKS. Disamping itu, peneliti mendeskripsikan bagaimana perubahan kesejahteraan keluarga peserta UPPKS sebelum dan setelah mengikuti program tersebut.
2. Penelitian dilaksanakan terhadap *stakeholder* dan instansi terkait pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelaksanaan program UPPKS untuk menemukan permasalahan yang menjadi penyebab belum tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Toba Samosir, antara lain:
  - a. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Toba Samosir terkait perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan UPPKS;
  - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan DPPKB Kabupaten Toba Samosir terkait perencanaan program kegiatan UPPKS;
  - c. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kecamatan terkait pelaksanaan program kegiatan UPPKS;
  - d. Ketua kelompok dan anggota kelompok UPPKS yang masih aktif terkait pelaksanaan program kegiatan UPPKS; dan
  - e. Auditor Inspektorat Kabupaten Toba Samosir terkait aspek pengawasan program kegiatan UPPKS.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam pemahaman tesis ini serta mampu menyajikan gambaran penelitian secara menyeluruh, maka disusunlah sistematika penulisan dalam kajian ini sebagai berikut

### **BAB I. Pendahuluan**

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

### **BAB II. Tinjauan Pustaka**

Bagian ini merupakan landasan teori penelitian berupa pembahasan konsep dan teori-teori mendasari dilakukannya riset yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, berita elektronik dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Landasan teori ini juga mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan studi ini, kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan sekaligus pengajuan hipotesis.

### **BAB III. Metode Penelitian**

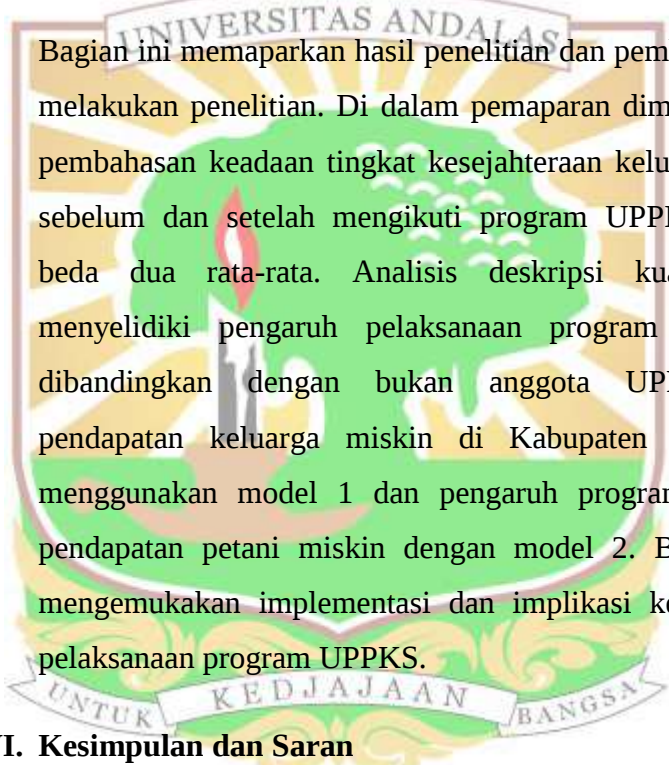
Bagian ini memuat daerah lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta metode analisa pengolahan data yang dilengkapi dengan defenisi operasional variabel.

### **BAB IV. Gambaran Umum Penelitian**

Bagian ini mendeskripsikan peran dan perkembangan program UPPKS di Kabupaten Toba Samosir. Peran program UPPKS memperlihatkan manfaat dan keanggotaan UPPKS sesuai dengan tabulasi pengisian kuesioner oleh responden sekaligus mengulas secara detail keadaan program UPPKS dari segi

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Adapun analisis kualitatif dapat menemukan permasalahan penyebab belum tercapainya tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Bagian ini juga mendeskripsikan daerah penelitian, kondisi kependudukan secara umum dan deskripsi karakteristik responden baik anggota maupun bukan anggota kelompok UPPKS yang telah menjadi objek penelitian di Kabupaten Toba Samosir.

## **BAB V. Hasil Penelitian dan Pembahasan**



Bagian ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan selama melakukan penelitian. Di dalam pemaparan dimaksud, terdapat pembahasan keadaan tingkat kesejahteraan keluarga responden sebelum dan setelah mengikuti program UPPKS melalui uji beda dua rata-rata. Analisis deskripsi kuantitatif untuk menyelidiki pengaruh pelaksanaan program bagi anggota dibandingkan dengan bukan anggota UPPKS terhadap pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Toba Samosir menggunakan model 1 dan pengaruh program ini terhadap pendapatan petani miskin dengan model 2. Bagian ini juga mengemukakan implementasi dan implikasi kebijakan dalam pelaksanaan program UPPKS.

## **BAB VI. Kesimpulan dan Saran**

Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis data dan juga berisi rekomendasi atau saran bagi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan dalam upaya percepatan pembangunan daerah dan secara khusus terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Toba Samosir.